

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap indikator yang diteliti, terdapat beberapa indikator yang efektif dalam mengatasi masalah implementasi kebijakan, namun ada juga indikator yang belum berhasil mengatasi kendala yang ada. Rincian lebih lanjut mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Komunikasi: Komunikasi efektif telah tercapai melalui sosialisasi rutin dan penyampaian informasi yang jelas, membantu masyarakat memahami kebijakan dan mengurangi resistensi. Hal ini mendukung kepatuhan terhadap peraturan..
2. Indikator Sumber Daya: Sumber daya memadai, baik dari segi personel maupun fasilitas, memungkinkan Satpol PP menjalankan tugas dengan optimal, termasuk pengawasan dan penertiban, yang meningkatkan efektivitas kebijakan.
3. Indikator Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang baik, melalui penerapan SOP dan pembagian kewenangan, memastikan pelaksanaan kebijakan yang terstandarisasi, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan koordinasi serta efisiensi.
4. Indikator Disposisi: Disposisi pelaksana belum optimal, ditandai oleh kurangnya komitmen dan sikap mendukung dari implementor, yang menghambat efektivitas

kebijakan. Diperlukan perbaikan untuk memastikan sikap pelaksana sejalan dengan tujuan kebijakan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP, peneliti mengusulkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat indikator disposisi, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan berkala yang berfokus pada peningkatan komitmen, integritas, dan sikap profesional personel Satpol PP, terutama dalam *soft skills* seperti empati, kepemimpinan, dan komunikasi; memberikan penghargaan atau insentif bagi personel yang menunjukkan kinerja dan disposisi baik guna mendorong sikap positif serta meningkatkan motivasi; dan menerapkan evaluasi berkala terhadap sikap dan perilaku di lapangan dengan tindak lanjut tegas bagi yang tidak mendukung kebijakan.
2. Untuk mengoptimalkan komunikasi, meskipun sudah berjalan baik, perlu ditingkatkan kualitas sosialisasi dengan menggunakan media interaktif seperti media sosial atau aplikasi khusus agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan, serta mengadakan sesi dialog atau forum terbuka dengan masyarakat dan pelaku PKL untuk mendengarkan masukan dan umpan balik yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dan penegakan kebijakan secara lebih efektif.

3. Untuk meningkatkan sumber daya, lakukan penilaian berkala terhadap kebutuhan personel, peralatan, dan teknologi pendukung agar sesuai dengan kondisi lapangan, serta perbaiki manajemen sumber daya dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi monitoring untuk efisiensi alokasi dan pemantauan tugas secara *real-time*.
4. Untuk memperkuat struktur birokrasi, lakukan evaluasi dan pembaruan rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tetap relevan dan mudah dipahami oleh seluruh personel, serta pertimbangkan penyederhanaan alur birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan respons di lapangan, sehingga tindakan penertiban dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.